

TAXAT PERPAJAKAN



LAPORAN PENELITIAN  
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

118  
11 28  
11 21 2  
Ang  
↓

## **ANALISIS REFORMASI PERPAJAKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR**

**Peneliti :**

**Drs. HERU TJARAKA, Ak., M.Si.  
Dra. Ec. SRI ISWATI, M.Si.  
Dra. Ec. PANDE MADE SRIASIH  
Dra. Ec. MURYANI**

### **LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000  
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999  
Nomor Urut : 28

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Februari, 2000

3000109003141



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
LEMBAGA PENELITIAN

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional       | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional           | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi                |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum         | 7. Puslit Olahraga                    |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246  
E-mail: ipunair@rad.net.id — http://www.geocities.com/Athens/Olympus.6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Analisis Reformasi Perpajakan Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Negara di Jawa Timur
- b. Macam Penelitian : ( ) Fundamental, ( ) Terapan, ( V ) Pengembangan, ( ) Institusional
- c. Katagori Penelitian : ( ) I ( V ) II ( ) III ( ) IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Heru Tjaraka, Ak., M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Muda / IIIa / 132 054 304
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Ekonomi
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Sosial Ekonomi
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 (Empat) orang
4. Lokasi Penelitian : Jawa Timur
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 3.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 22 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali ( V ) Baik ( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 22 Februari 2000

Mengetahui/Mengesahkan :  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini  
NIP. 130 355 372

**SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KEGIATAN  
PENELITIAN DIP UNAIR DAN DIK SUPLEMEN**

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR / ILUSTRASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB III    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	19
BAB IV    METODE PENELITIAN.....	20
BAB V    HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
BAB VI    KESIMPULAN DAN SARAN.....	36

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel :		
1.1.	Penerimaan Dalam Negeri 1969/1970-1993/1994.....	1
1.2.	Perkembangan Ekspor Harga Minyak Bumi Indonesia 1969-1997.....	3
5.1.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1983.....	26
5.2.	Penerimaan Pajak Pusat di Jawa Timur.....	27
5.3.	Uji Statistik t.....	30
5.4.	Analisa Rank Spearman.....	33
5.5.	Tabel Uji Heteroskedastisitas.....	34

## RINGKASAN

### **ANALISIS REFORMASI PERPAJAKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR.**

**(Heru Tjaraka, Sri Iswati, Pande Made Sriasih, Muryani, 1999, 50 Halaman).**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) Apakah pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur. (2) Apakah pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur. (2) Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur.

Definisi operasional masing-masing variabel adalah penerimaan pajak negara atau pajak pusat penerimaan negara yang didapat dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di propinsi Jawa Timur, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun dan Reformasi perpajakan diartikan sebagai perubahan untuk memperbaiki atau mengganti sistim perpajakan yang lama dengan sistim perpajakan yang baru, dalam penelitian ini adalah perubahan undang-undang perpajakan tahun 1983 dengan undang-undang perpajakan tahun 1994.

Variabel ini merupakan variabel *dummy* yaitu variabel untuk menyatakan data-data yang bersifat kualitatif, yang mempunyai nilai sama dengan nol (0) jika variabel tersebut tidak berpengaruh dan memiliki nilai sama dengan satu jika (1) jika variabel tersebut berpengaruh. Penelitian ini diadakan di Jawa Timur dengan periode penelitian antara tahun 1973-1998. Data yang dipakai data sekunder berupa data time series, data diolah dengan menggunakan alat bantu berupa program SPSS, guna menjawab hipotesis dan permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan statistik dan pembuktian menunjukkan bahwa variabel bebas yang dimasukkan dalam model, yaitu PDRB Jawa Timur dan variabel *dummy* atau reformasi perpajakan tahun 1994 baik secara parsial maupun secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur selama periode tahun 1975 sampai dengan 1997. Hal ini didukung oleh nilai  $t$  hitung variabel PDRB Jawa Timur = 27,243 > nilai  $t$  tabel = 2,069 dan  $t$  hitung variabel *dummy* = 6,76 >  $t$  tabel = 2,069 dan nilai  $F$  hitung = 682,013 > nilai  $F$  tabel = 3,49 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara parsial dan simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Dari kedua pembuktian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan kedua terbukti kebenarannya.

(L.P. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga : No. Kontrak 805 / J03.2 / PG / 1999)

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dana untuk pengeluaran pembangunan dan keperluan rutin semakin meningkat, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan. Sejak Pelita I sampai dengan Pelita III pembangunan telah berjalan dengan lancar karena penerimaan negara dari minyak dan gas bumi (MIGAS) dapat meningkat dengan cepat. Dalam tabel I dapat dilihat bahwa migas memiliki peranan dominan terhadap penerimaan dalam negeri, selama pelita tiga penerimaan dalam negeri didominasi oleh penerimaan migas sebesar 66%, penerimaan lain sebesar 34%.

TABEL 1.1.  
PENERIMAAN DALAM NEGERI 1969/1970-1997/1998  
(DALAM MILYAR)

Tahun Anggaran	Penerimaan Migas		Penerimaan Non Migas		Jumlah
	Nilai	%	Nilai	%	
<i>Pelita I</i>					
1969/1970	66	27	178	73	244
1970/1971	99		246		345
1971/1972	141		287		428
1972/1973	231		360		591
1973/1974	382	39	586	61	968
<i>Pelita II</i>					
1974/1975	957	55	797	45	1.754
1975/1976	1.248		994		2.242
1976/1977	1.635		1.271		2.906
1977/1978	1.949		1.586		3.535
1978/1979	2.309	54	1.957	46	4.266
<i>Pelita III</i>					
1979/1980	4.260	64	2.437	36	6.697
1980/1981	7.020		3.207		10.227
1981/1982	8.628		3.585		12.213
1982/1983	8.170		4.248		12.418
1983/1984	9.520	66	4.913	34	14.435

<i>Pelita IV</i>					
1984/1985	10.430	66	5.476	34	15.906
1985/1986	11.144	58	8.109	42	19.235
1986/1987	6.338	40	9.803	61	16.141
1987/1988	10.047	48	10.756	52	20.803
1988/1989	9.9527	41	13.477	59	23.004
<i>Pelita V</i>					
1989/1990	11.252	39	17.487	61	28.740
1990/1991	10.783	34	20.200	67	31.584
1991/1992	15.009	37	25.175	63	40.184
1992/1993	13.948	30	32.561	70	46.508
1993/1994	14.653	29	34.552	71	49.205

Sumber : Nota Keuangan Dan RAPBN 1997/1998, Republik Indonesia

Jika diperhatikan dari tabel diatas nampak bahwa penerimaan migas yang dominan pada Pelita II dan III mengalami penurunan setelah periode tersebut. Makin menurunnya pertumbuhan penerimaan migas ini disebabkan oleh merosotnya harga minyak bumi dipasaran internasional, hal ini akan berakibat pada menurunnya penerimaan negara dari sektor migas yang telah bertahun-tahun menjadi andalan penerimaan negara. Perkembangan harga minyak bumi dapat dilihat pada Tabel 1.2. Lemahnya harga minyak bumi lebih disebabkan pada saat harga minyak bumi tinggi permintaan dunia menurun secara bertahap, yang diakibatkan oleh kemampuan negara konsumsi mengganti minyak bumi dengan energi lain serta keberhasilan mereka dalam menghemat energi. Selain itu sejumlah negara penghasil minyak diluar OPEC berhasil meningkatkan produksinya sehingga penawaran minyak bumi semakin meningkat.



TABEL 1.2  
PERKEMBANGAN EKSPOR HARGA MINYAK BUMI INDONESIA  
1969 - 1997 (US \$ / BARREL)

Tahun	Bulan	Harga	Tahun	Bulan	Harga
1969	Januari	1,67	1989	Januari	17,04
1971	April	2,21		April	18,21
1972	April	2,96		Desember	18,07
1973	April	3,73	1990	Januari	19,24
1974	April	11,7		April	17,49
1975	Oktober	12,8		Desember	18,07
1976	Januari	11,23	1991	Januari	19,69
1977	Januari	13,55		April	19,70
1978	Desember	13,42		Desember	19,75
1979	Januari	13,90	1992	Januari	19,90
	Desember	25,50		April	19,95
1980	Januari	27,50		Desember	19,85
	Mei	31,50	1993	Januari	18,20
19810	Januari	35		April	18,25
1982	November	34,53		Desember	18,35
1983	Maret	29,53	1994	Januari	15,65
1984	Desember	29,53		April	15,70
1985	Februari	28,53		Desember	15,75
1986	Januari	25,13	1995	Januari	16,00
	April	10,66		April	16,28
	Desember	13,07		Desember	16,00
1987	Januari	15,39	1996	Januari	16,25
	April	17,57		April	16,50
	Desember	16,93		Desember	16,30
1988	Januari	17,22	1997	Januari	16,25
	April	16,04		April	16,40
	Desember	14,08		Desember	16,35

Sumber : Nota Keuangan Dan RAPBN 1997/1998, Republik Indonesia.

Tidak menentunya harga pasaran minyak bumi menyebabkan sulitnya harga minyak bumi dipasaran internasional kembali mengalami masa harga keemasan. Begitu pula dengan Indonesia tidak mungkin hanya atau tetap mengandalkan penerimaan negara dari migas. Dalam rangka menyesuaikan perekonomian Indonesia karena merosotnya harga minyak bumi tersebut maka harus dicari sumber-sumber penerimaan lain dari sektor non migas, diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan ekspor non migas, hal ini tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena karena situasi dan struktur ekonomi internasional bagi negara-negara yang memproduksi komoditas industri baru, yaitu dengan adanya proteksi yang ketat dari negara maju dan praktek-praktek perdagangan yang tidak fair.
- b. Memperbesar hutang luar negeri. Bantuan luar negeri dengan syarat lunak tentunya akan sulit diperoleh, karena Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara menengah, sehingga sudah dianggap mulai bisa berdiri sendiri.

Karena alternatif-alternatif banyak mengalami benturan-benturan, maka untuk tetap dapat mempertahankan kondisi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sebaik-baiknya serta untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pembiayaan pembangunan harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk itu sejak tahun 1982 pemerintah melakukan dan penelitian kearah penyempurnaan sistem dan struktur perpajakan yang dianggap sudah usang dan menghambat perkembangan penerimaan negara serta dunia usaha. Hal ini sesuai yang tercantum dalam REPELITA V.

“Unsur terbesar dari penerimaan negara diluar migas adalah pajak, dengan demikian kebijaksanaan perpajakan memiliki peranan yang menentukan dalam upaya meningkatkan penyediaan dana yang cukup bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Penerimaan dari berbagai sumber perpajakan mutlak harus berhasil ditingkatkan secara berarti dalam Repelita V. dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, maka dalam Repelita V pengelolaan perpajakan akan semakin disempurnakan, efisiensi administrasi makin ditingkatkan dan bersamaan dengan itu aparatur perpajakan harus makin dimantapkan agar makin mampu, makin tertib dan makin efisiensi” (Repelita lima tahun V, 1989/1990-1993/1994, Buku I, hal ; 36).

Usaha pemerintah tersebut pada tahun 1983 telah menghasilkan berbagai perundangan-undangan dibidang perpajakan yang lebih dikenal dengan Reformasi Perpajakan Indonesia atau Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional. Dikeluarkannya undang-undang perpajakan tahun 1983 ini merupakan usaha pemerintah untuk mengadakan pembahasan sistem perpajakan, yaitu untuk menggantikan sistem perpajakan warisan penjajah yang jelas tidak sesuai lagi dengan semangat perpajakan dalam alam

Indonesia merdeka dan juga tidak sesuai dengan tuntutan jaman. Sistem perpajakan yang baru diharapkan akan mampu mengerahkan sumber-sumber dalam negeri yang berasal dari sektor diluar migas, terutama dengan menggali potensi pajak yang belum direlisasikan, akhirnya sistem pajak yang baru ini ditujukan untuk mengerahkan kemampuan sendiri dalam membiayai pembangunan dan mengatur rumah tangga negara.

Ciri-ciri pokok dari pembaharuan sistem perpajakan nasional tersebut adalah :

- a. Wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam aktifitas perpajakan, yang tidak hanya dipandang sebagai obyek pajak tetapi juga sebagai subyek pajak yang juga diberi kepercayaan untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri paja yang terhutang. Sistem ini dikenal dengan sistem *self assesment* sebagai pengganti sistem lama yang dikenal dengan *official assesment*.
- b. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai pembangunan.

Dengan dilaksanakannya reformasi perpajakan tahun 1983 ini diharapkan kemampuan pemerintah khususnya instansi perpajakan menjadi lebih baik sehingga realisasi penerimaan pajak dapat meningkat sesuai dengan yang diperlukan. Total penerimaan pajak (dalam hal ini pajak negara atau pusat) pemungutannya berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dimana setiap wilayah memberikan sumbangan atau peranan yang tidak sama karena tiap wilayah tersebut memang mempunyai potensi yang tidak sama pula. Dalam hal ini Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi ekonomi cukup besar, yaitu dilihat dari pertumbuhan ekonominya (kenaikan PDRB) yang selalu lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan dalam periode 1983-1989 Jawa Timur secara rata-rata telah menguasai 15,20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Adapun dalam usaha untuk merealisasikan penerimaan pajak negara atau pajak pusat, Jawa Timur juga mempunyai peranan cukup penting karena selama ini sumbangan yang diberikan oleh Jawa Timur terhadap penerimaan pajak negara atau pajak pusat secara nasional selalu menduduki urutan kedua sesudah DKI Jaya.

Dengan demikian Jawa Timur mempunyai potensi fiskal yang cukup besar dan diharapkan realisasi penerimaan pajak negara atau pajak pusat di Jawa Timur akan semakin meningkat dengan dilaksanakannya reformasi perpajakan 1994, sehingga pada akhirnya mampu memperbesar sumbangannya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak terutama untuk mengantisipasi menurunnya penerimaan dari migas.

### 1.2. Permusan Masalah

Menurunnya penerimaan migas akibat dari merosotnya harga minyak bumi dipasaran internasional ternyata sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluarannya, hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan APBN. Keadaan yang demikian ini akan semakin memperberat kondisi perekonomian Indonesia yang masih lesu akibat resesi ekonomi dunia untuk mempertahankan kemampuannya dalam membiayai pembangunan maka pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaannya dari sektor non migas khususnya dari penerimaan pajak. Usaha ini dilakukan dengan mengadakan reformasi perpajakan tahun 1983 dan tahun 1994, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan tahun 1983 dan tahun 1994.

Pelaksanaan reformasi perpajakan tersebut menyangkut pembaharuan sistem perpajakan yang sangat mendasar, maka adalah wajar jika dalam pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian diri dan semangat baik dari kalangan aparat perpajakan sendiri maupun dari masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap beban bagaimanapun juga tentu sedikit banyak ingin dielakan oleh mereka yang menerima beban itu. Ternyata pada tahun pertama setelah dilakukan undang-undang perpajakan yang baru tersebut penerimaan pajak negara atau pajak pusat di Jawa Timur justru mengalami penurunan.

Mengingat Jawa Timur merupakan daerah yang mempunyai potensi ekonomi tinggi dan juga mempunyai penerimaan penting dalam sumbangannya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, maka perumusan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pusat atau pajak negara di Jawa Timur.
2. Apakah pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pusat atau pajak negara di Jawa Timur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Reformasi Perpajakan Sebagai Kebijakan Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak

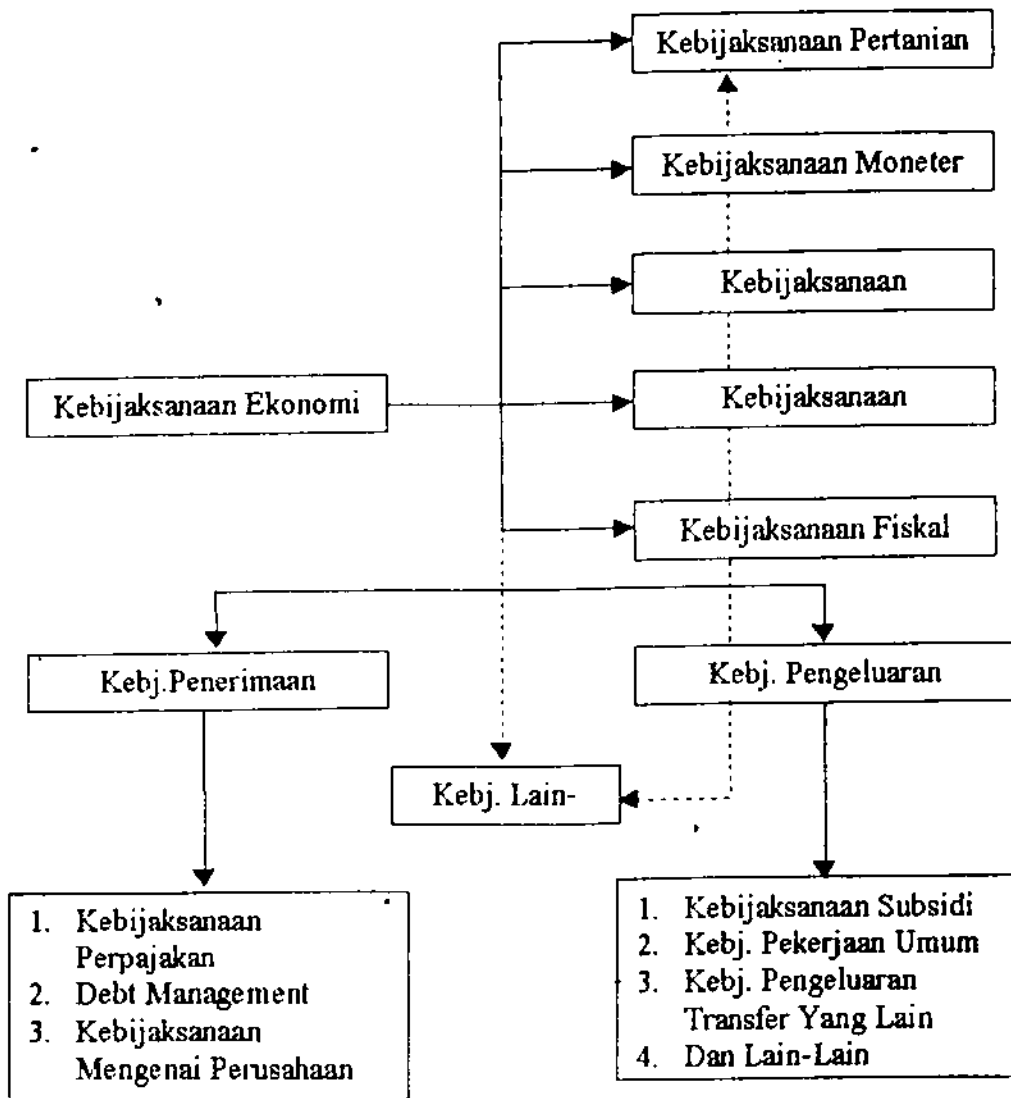
Istilah fiskal berasal dari bahasa latin *fiskalis* yang berasal dari kata benda *fiscus* yang berarti keranjang uang. Dewasa ini istilah *fiscus* sering digunakan sebagai kas negara. Hal ini disebabkan kas negara dengan sebagian besar uang rakyat dari pungutan pajak, maka *fiscus* sering dikaitkan dengan bagian yang mengurus uang negara yang sekarang terkenal dengan sistem perpajakan atau segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi suatu negara tergantung pada kebijakan fiskal yang dianut oleh pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi cara-cara melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan peningkatkan kesemoatan kerja. Secara ringkas kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi yang mantap serta keberhasilan pembangunan. Jadi kebijakan pajak merupakan salah satu dari kebijakan fiakal dan kebijakan fiskal itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan ekonomi, yang tercermin dalam bagan 2.1.

Kebijakan fiskal di Indonesia dapat diamati atau dilihat melalui APBN. Kebijakan fiskal adalah kebijakan lewat APBN, yang memiliki dua sisi

yaitu sisi yang mencatat penerimaan (menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh) dan sisi yang mencatat pengeluaran (menunjukkan semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya).

BAGAN 2.1.  
RUANG LINGKUP KEBIJAKSAAN FISKAL DAN PERPAJAKAN



Sumber : Soetrisno P.H., Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara, BPFE, UGM., Yogyakarta, 1982, hal. 24.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan ruang lingkup kebijaksanaan fiskal maka reformasi perpajakan tahun 1994 merupakan kebijakan fiskal karena tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hubungannya dengan perpajakan maka pengelolaan APBN harus semakin disempurnakan agar penerimaan negara makin meningkat, sedangkan pengeluaran negara makin terkendali dan terarah dan peranan tabungan pemerintah dalam anggaran pembangunan negara dapat meningkat.

### 2.1.2. Kebijakan Serta Perkembangan Sistem Perpajakan Nasional Indonesia.

Seperti telah diuraikan di depan bahwa pajak mempunyai peranan penting dalam kebijaksanaan fiskal atau dapat dikatakan kebijaksanaan fiskal menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mengenai hal ini Suparmoko (1983 ; 270) mengemukakan sebagai berikut : "Kebijaksanaan fiskal memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi berhasil tidaknya bergantung pada perbaikan-perbaikan sistem perpajakan dan pelaksanaannya". Sistem perpajakan sendiri bisa diartikan sebagai pola pelaksanaan perpajakan yang terkoordinasi. Sistem perpajakan sendiri terdiri dari tiga faktor, yaitu :

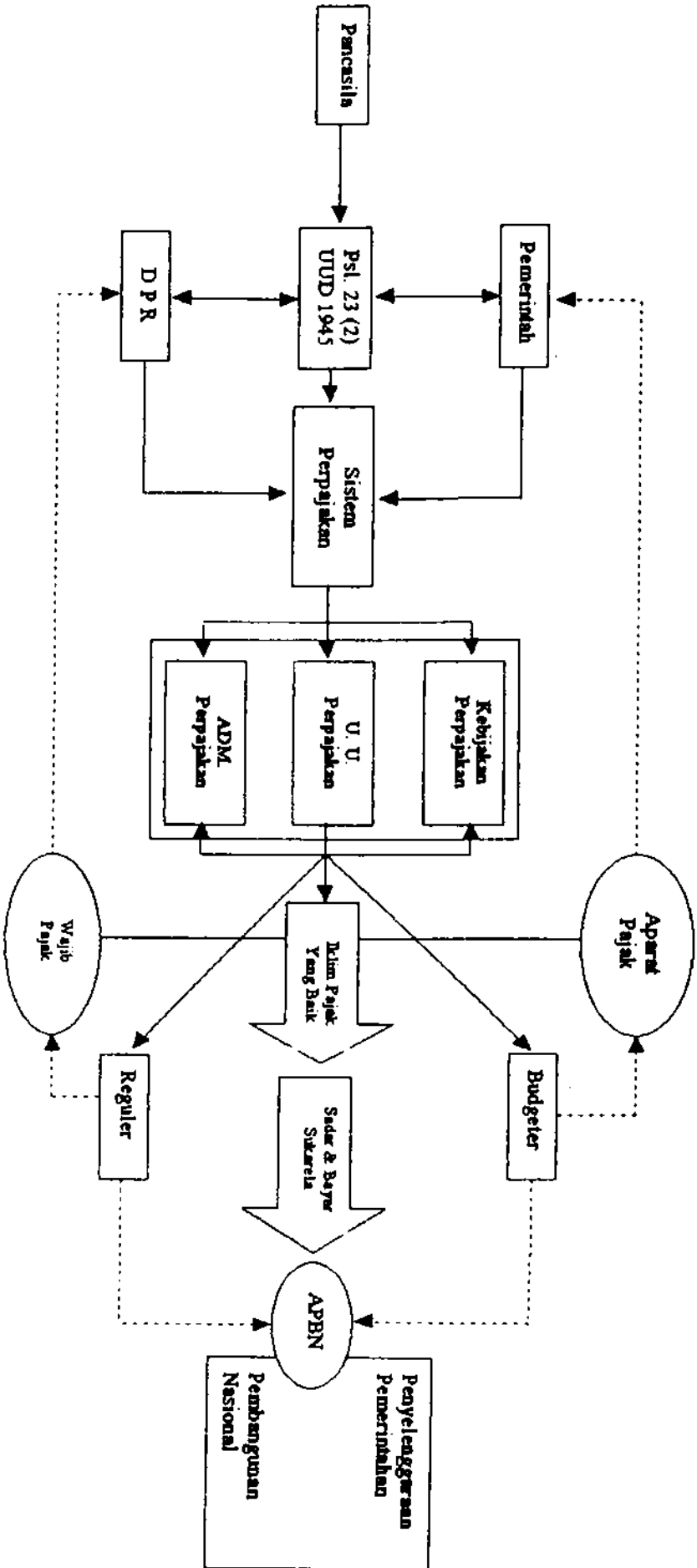
1. Kebijakan perpajakan (tax policy)
2. Undang-Undang perpajakan (tax law)
3. Administrasi perpajakan (tax administration).

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu ketiganya harus berjalan serasi (Atep Adya Barata Dan Zul Afii Ardian, 1989 ; 23).

Apabila kita simak, faktor-faktor tersebut diatas juga merupakan fase perpajakan. Dalam mewujudkan perpajakan yang baik, pertama-tama harus menetapkan kebijaksanaan perpajakan, sehingga Undang-Undang tersebut digunakan sebagai landasan pemungutan pajak, yang pelaksanaannya termasuk masalah administrasi perpajakan. Secara grafis dapat dilihat pada bagan 2.2.



BAGAN 2.2.  
BAGAN PERPAJAKAN DI INDONESIA



Sumber : Atep Adya Bermana Dan Zuli Afdi Ardian, *Perpajakan*, CV. Armico, Bandung, 1989, Jilid I, Hal. 28.

Untuk mewujudkan terselenggaranya perpajakan yang baik dan sehat, sehingga dapat menunjang penerimaan negara, maka sistem perpajakan harus ditingkatkan dan dalam hal ini sistem perpajakan suatu negara harus mencerminkan tujuan ekonomi, politik dan sosial pemerintahnya. Untuk hal itu pemerintah Indonesia pada tahun 1994 secara mantap telah memutuskan suatu kebijaksanaan perpajakan, yaitu dengan merubah sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem perpajakan baru, yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi, politik dan sosial pemerintah.

Suatu pemungutan pajak perlu dilandasi dengan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengikat dan mempunyai kepastian hukum sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kekerasan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Untuk itu sebagai tindak lanjut dari penetapan kebijaksanaan perpajakan, maka dirancanglah undang-undang perpajakan yang akan disahkan oleh DPR yang akan berlaku diseluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur.

Perombakan kebijaksanaan perpajakan dilakukan secara total, hal ini merupakan pembaharuan dibidang perpajakan (*tax reform*) secara menyeluruh. Pembaharuan sistem perpajakan itu menghasilkan lima undang-undang perpajakan yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1994, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1994, tentang Pajak Penghasilan (PPH), mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1994, tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) barang dan jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), mulai berlaku sejak sejak tanggal 1 Januari 1994.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1994, tentang Bea Meterai, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.

- h. Mengatur bahwa pengajuan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak yang dapat dibentuk di beberapa daerah sehingga pelayanan sengketa pajak dapat diberikan dengan cepat dan mudah ;
- i. Mengatur pemberian ganti rugi kepada Wajib Pajak dalam hal keberatan atau banding dikabulkan terhadap Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya ;
- j. Sanksi administrasi dan sanksi pidana diperberat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ;
- k. Menagtur tentang penyanderaan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya
- l. Mengatur pengenaan sanksi pidana terhadap pihak ketiga yang tidak memenuhi permintaan memberikan keterangan.

Adapun pokok-pokok perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1994, tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur lebih rinci mengenai Obyek Pajak, misalnya meliputi pula tambahan kekayaan neto dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak. Disamping itu diatur pula perluasan Obyek Pajak terhadap Wajib Pajak luar negeri termasuk juga segala pembayaran jasa, keuntungan karena pengalihan harta dan pembayaran premi keluar negeri ;
- b. Menegaskan bahwa pengeluaran yang berkenaan dengan upaya pengembangan IPTEK dan peningkatan kualitas SDM dapat dibebankan sebagai biaya ;
- c. Mengatur lebih tegas upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia dengan memungkinkan memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Fasilitas perpajakan juga diberikan terhadap Bentuk Usaha Tetap yang menanamkan modal kembali laba setelah pajaknya di Indonesia, yaitu sebagai rangsangan penanaman modal ;
- d. Mengatur tentang kompensasi kerugian sampai dengan delapan tahun tidak dibatasi pada jenis usaha lainnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah ;

- e. Mengatur ketentuan mengenai upaya-upaya pelestarian ekosistem, yaitu dengan memperkenankan pembentukan atau pemupukan cadangan untuk reklamasi dan biaya untuk pengolahan limbah dan menjaga lingkungan ;
- f. Mengatur bahwa penyusutan atas harta dapat dilakukan juga dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak dan dilakukan terhadap masing-masing harta yang bersangkutan ;
- g. Mengatur empat lapisan tarif dengan tarif terendah 10 % dan tarif tertinggi 30% yang setiap kali dengan peraturan pemerintah dapat diturunkan secara bertahap sehingga pada akhirnya dapat dimungkinkan tarif tertinggi menjadi 25 %, dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan menunjang perekonomian dalam negeri khususnya dalam menarik investasi ;
- h. Mengatur ketentuan mengenai penetapan mengenai saat perolehan deviden dari "*controlled foreign corporation*" diluar negeri dengan tujuan untuk mencegah penghindaran pajak melalui penundaan pembagian laba dalam waktu yang ditentukan atas penanaman modal dalam negeri ;
- i. Memperluas pemotong dan pemungut pajak serta memperluas obyek pemotongan dan pemungutan pajak, dengan tujuan untuk menyederhanakan investasi pemungutan pajak dan mengamankan sistem *self-assesment* ;
- j. Mengatur tentang pemungutan pajak yang bersifat final untuk menyederhanakan administrasi pajak dengan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak ;
- k. Mengatur tentang kemungkinan dilakukan penilaian kembali aktiva agar penyusutan dapat dihitung atas nilai yang lebih wajar. Disamping itu dimungkinkan penilaian aktiva atas dasar nilai lain selain nilai pasar dalam rangka merger dan sejenisnya ;
- l. Mengatur tentang keringanan pengenaan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima oleh pengusaha kecil dan koperasi ;

Pokok-pokok perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1994, tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) barang dan jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) adalah sebagai berikut :

a. Memperluas Obyek Pajak yaitu ditambah dengan :

- Barang tidak berujud baik berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia, yaitu dalam rangka mengantisipasi persaingan global ;
- Barang-barang yang bukan merupakan hasil proses pabrikasi ;
- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya perlakuan yang sama terhadap barang sendiri Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diproduksi dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan pemakaian sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Namun demikian, untuk barang-barang dan jasa-jasa tertentu sangat diperlukan oleh masyarakat tetap tidak dijadikan Obyek Pajak, misalnya barang-barang hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang belum diolah lebih lanjut ;

- b. Mengatur ketentuan bahwa pengusaha kecil pada dasarnya dibebaskan dari kewajiban memungut PPn namun dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, sehingga tidak menghambat pertumbuhan dan kegiatan usahanya dan dapat membuat Faktur Pajak yang sering disyaratkan oleh para pembelinya ;
- c. Mengatur ketentuan bahwa restitusi pajak hanya dapat dilakukan setiap bulan terbatas pada kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kegiatan ekspor maupun dari transaksi dengan pemungutan PPn. Sedangkan kelebihan pembayaran pajak lainnya dapat diberikan restitusi setiap akhir tahun buku, tetapi kelebihan pembayaran pajak pada setiap bulan tetap dapat diperhitungkan atau dikompensasikan dengan pajak yang terutang pada bulan berikutnya ;

- d. Mengatur ketenyuan bahwa Pajak Masukan atas Barang Modal tidak dapat dikreditkan tetapi dapat dikapitalisasi dan dapat dibebankan sebagai biaya melalui proses penyusutan, dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan, pengadministrasian dan mencegah penyalahgunaan ;
- e. Mengatur ketentuan bahwa dalam rangka merger, perubahan bentuk badan usaha dan kegiatan sejenisnya, pengalihan persediaan persediaan Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPn dan PPn BM. Disamping itu Pajak Masukan yang telah dibayar atas perolehan persediaan Barang Kena Pajak yang dialihkan tersebut tidak perlu dibayar kembali ;
- f. Memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu didalam daerah Pabean atau terhadap barang atau jasa tertentu yang ditujukan untuk peningkatan investasi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja baru dan menunjang pelestarian lingkungan hidup ;
- g. Mengatur ketentuan bahwa orang atau badan tertentu sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPn.

Pokok-pokok perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diatur adanya Nilai Jual Obyek Pajak yang tidak dikenakan pajak bagi setiap Wajib Pajak. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi Wajib Pajak yang hanya memiliki, menguasai dan memanfaatkan Obyek Pajak yang hanya berupa bumi saja dengan nilai tertentu.

## **2.2. Hipotesis Dan Model Analisis**

### **2.2.1. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah ditetapkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga, pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pusat atau pajak negara di Jawa Timur.<sup>17</sup>
2. Diduga, pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pusat atau pajak negara di Jawa Timur.

### 2.2.2. Model Analisis

Untuk mengamati pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan model regresi linear berganda dengan pendekatan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Sebagai variabel yang dijelaskan adalah penerimaan pajak negara atau pajak pusat di Jawa Timur yang dinotasikan dengan Y. Sebagai variabel yang menjelaskan (bebas) adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel dummy reformasi perpajakan tahun 1994 yang dinotasikan dengan  $X_1$  sampai dengan  $X_2$ . Adapun model analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan pajak negara atau pajak pusat di Jawa Timur  
 $X_1$  = Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur  
 $X_2$  = Variabel dummy berupa reformasi perpajakan tahun 1994  
 e = Faktor galat  
 $\beta_0$  = Konstanta  
 $\beta_{1,2}$  = Koefisien Regresi

Penggunaan metode OLS ini didasarkan pada asumsi-asumsi model linier klasik (J. Supranto, 1983:193 ; Sugiarto, 1992:68 ; Aris Ananta, 1987:11). Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Rata-rata gangguan sama dengan nol,  $E(e) = 0$ , artinya asumsi ini menginginkan model yang dipakai dapat secara tepat menggambarkan rata-rata variabel terikat

dalam tiap observasi. Bila sampel diulang-ulang dengan variabel bebas yang tetap, maka kesalahan dalam tiap observasi mempunyai nilai rata-rata sama dengan nol atau saling meniadakan.

2. Homoskedastis. Hal ini dimaksudkan bahwa varians tidak berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau dapat dikatakan setiap observasi memiliki reliabilitas yang sama.
3. Non otokorelasi,  $E(e_i, e_j) = 0$ , artinya gangguan dari satu observasi tidak berkorelasi dengan gangguan di observasi lainnya atau nilai variabel terikat hanya dijelaskan oleh variabel bebas bukan oleh variabel gangguan.
4. Non Multicolinearity,  $E(e_i, e_j) = 0$ , artinya antara variabel-variabel bebas yang digunakan tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya.
5. Gangguan tidak berkorelasi dengan variabel bebas, artinya nilai variabel bebas dari satu sampel ke sampel lainnya, karena memang variabel ini yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat.
6. Gangguan didistribusikan menurut distribusi normal, terutama untuk peramalan dan pengujian hipotesa.



### BAB III

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, apakah pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pusat atau pajak negara di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui, apakah pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan tahun 1994 secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pusat atau pajak negara di Jawa Timur.
3. Disamping itu dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya sumbangan pemikiran yang positif tentang langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan sumbangan Jawa Timur terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

#### 3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat dipakai sebagai informasi tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
2. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perpajakan.
3. Dapat memberikan informasi atau merangsang pihak lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat adalah penerimaan pajak negara atau pajak pusat, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Reformasi perpajakan tahun 1994

### 4.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel-variabel yang dimasukkan dalam model adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak negara atau pajak pusat penerimaan negara yang didapat dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di propinsi Jawa Timur, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun. Data PDRB yang tersedia berupa data tahun takwim (1 Januari - 31 Desember) sedangkan data penerimaan pajak tersedia dalam tahun anggaran (1 April -31 Maret). Untuk menyesuaikan data PDRB kedalam tahun anggaran dengan cara interpolasi linier, yang menggunakan rumus sebagai berikut (Insukindro 1984 ; 450) :

$$Q_1 = \frac{1}{4} (Y_t - \frac{4,5}{12} (Y_t - Y_{t+1}))$$

$$Q_2 = \frac{1}{4} (Y_t - \frac{1,5}{12} (Y_t - Y_{t+1}))$$

$$Q_3 = \frac{1}{4} (Y_t + \frac{1,5}{12} (Y_t - Y_{t+1}))$$

$$Q_4 = \frac{1}{4} (Y_t + \frac{4,5}{12} (Y_t - Y_{t+1}))$$

Dimana :

$Q$  = data triwulan

$Y_t$  = data pada tahun yang sedang berlaku

$Y_{t-1}$  = data pada tahun sebelumnya

Dari hasil perhitungan diatas maka tahun anggaran didapat dengan cara :

- a. Semester satu tahun anggaran waktunya sama dengan triwulan II dan III dari PDRB tahun yang berlaku.
  - b. Semester II tahun anggaran waktunya sama dengan triwulan I dan IV dari PDRB tahun berikutnya.
2. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun.
  3. Reformasi perpajakan diartikan sebagai perubahan untuk memperbaiki atau mengganti sistim perpajakan yang lama dengan sistim perpajakan yang baru, dalam penelitian ini adalah perubahan undang-undang perpajakan tahun 1983 dengan undang-undang perpajakan tahun 1994. Variabel ini merupakan variabel *dummy* yaitu variabel untuk menyatakan data-data yang bersifat kualitatif, yang mempunyai nilai sama dengan nol (0) jika variabel tersebut tidak berpengaruh dan memiliki nilai sama dengan satu jika (1) jika variabel tersebut berpengaruh (Amudi Pasaribu, 1976 ; 143).

#### 4.3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa data runtut waktu atau *time series*, yang diperoleh dari :

- a. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.
- b. Kantor Statistik Propinsi Dati I Jawa Timur.
- c. Sumber bacaan lain, diantaranya nota keuangan RI dan mingguan pajak.

#### 4.4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Survey pendahuluan yang ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan menentukan faktor-faktor terkait yang dapat digunakan dalam penelitian ini.
2. Studi kepustakaan, dilakukan agar dapat memperoleh informasi dari literatur-literatur mengenai landasan teoritis bagi penulisan penelitian ini.
3. Pengumpulan data untuk mendapatkan data-data dari semua faktor yang akan dianalisa.

#### 4.5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis kualitatif, di mana diuraikan dan dibahas setiap data yang diperoleh sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan penelitian ini.
2. Analisis kuantitatif, melalui analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menaksir parameter. Metode penaksiran yang dipakai adalah metode kuadrat terkecil biasa atau OLS (*Ordinary Least System*) (J. Supranto, 1983:68).

Penggunaan metode OLS ini didasarkan pada asumsi-asumsi model linier klasik (J. Supranto, 1983:193 ; Sugiarto, 1992:68 ; Aris Ananta, 1987:11). Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Rata-rata kesalahan pengganggu adalah nol.
2. Tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu yang satu dengan lainnya.
3. Setiap kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama.
4. Gangguan didistribusikan menurut distribusi normal. Asumsi ini diperlukan terutama untuk peramalan dan pengujian.
5. Tidak ada multikolinearitas, yang berarti tidak ada hubungan linier yang eksak antara variabel-variabel bebas.
6. Kovarian setiap kesalahan pengganggu dengan setiap variabel bebas adalah nol. Dengan kata lain tak ada korelasi antara kesalahan pengganggu dengan setiap variabel bebas yang tercakup dalam persamaan regresi linier berganda.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, maka analisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) akan diperoleh pemerkiraan terbaik linier yang tak bias

atau *Best Linear Unbiased Estimator* atau BLUE (J. Supranto, 1983:88). Asumsi-asumsi ini juga berlaku pada model regresi linier berganda.

Selanjutnya model tersebut diuji untuk pembuktian hipotesis dengan memakai beberapa kriteria penilaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana hubungan antar variabel tersebut. Kriteria-kriteria penilaian tersebut adalah uji statistik F dan uji statistik t.

Uji statistik F untuk menunjukkan apakah variabel bebas tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantug. Bila uji statistik F menunjukkan signifikan, maka secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantug (Makridakis, Wheelwright, & McGee, 1991:240).

Koefisien korelasi ( $R^2$ ) untuk menunjukkan kemampuan model regresi untuk menerangkan variabel terikat. Biasanya  $0 \leq R^2 \leq 1$  (J. Supranto, 1983:206). Semakin dekat nilai  $R^2$  dengan 1, maka semakin kuatlah model tersebut dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dan sebaliknya, bila mendekati 0 maka semakin lemahlah model tersebut dalam menerangkan variasi variabel terikat. Namun seringkali nilai  $R^2$  tinggi tidak mempunyai arti sehingga digunakan  $R^2$  (*R adjusted*) yang lebih realistis (J. Supranto, 1983:220).

Seperti yang dikatakan oleh Aris Ananta (1987:41) nilai  $R^2$  akan meningkat dengan naiknya jumlah variabel bebas dalam persamaan. Tetapi dengan menambah jumlah variabel bebas maka derajat bebas makin kecil. Maka naiknya  $R^2$  mungkin tidak memberi tanda bahwa model semakin dapat menjelaskan variasi variabel terikatnya. Oleh karena itu dipakai  $R^2$  yang sudah memperhitungkan derajat bebas.

Uji statistik t dipakai untuk menunjukkan pengaruh setiap variabel bebas secara individu, dikontrol oleh variabel bebas lain dalam persamaan yang bersangkutan, dalam menerangkan variabel tak bebas. Dengan kata lain akan dilihat apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Bila hasil uji t menunjukkan hasil yang signifikan, maka variabel bebas tersebut secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika sebaliknya, maka variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Singkatnya, uji t terhadap sebuah koefisien individu.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Luas wilayah propinsi Jawa Timur lebih kurang 157.922,48 km<sup>2</sup> yang terbagi atas daratan seluas 47.922,48 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari dataran rendah, dataran berbukit, dataran menengah, dan dataran tinggi, sedangkan perairannya seluas 110.000 km<sup>2</sup> dengan pulau-pulau kecil sebanyak kurang lebih 68 buah. Letak astronomisnya adalah antara 7°12' - 8°48' Lintang Selatan dan 111° - 114° Bujur Timur. Sebelah barat propinsi Jawa Timur berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah, sebelah timur dengan Selat Bali, utara dengan Laut Jawa, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif propinsi Jawa Timur terdiri dari 37 kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi 28 kabupaten dan 8 kotamadya serta 1 kota administratif. Secara keseluruhan meliputi 580 kecamatan, 7.724 desa, dan 654 kelurahan. Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang terluas, yaitu 5.782 km<sup>2</sup> atau 12,07% dari luas propinsi Jawa Timur. Sebaliknya, Kotamadya Mojokerto dengan luas 16,48 km<sup>2</sup> atau 0,03% dari luas propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang terkecil. Kotamadya Malang dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut merupakan kota yang tertinggi. Sedangkan Surabaya merupakan kota yang terendah, dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut.

Sebagai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah serta adanya partisipasi dari seluruh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mampu ditingkatkan melebihi pertumbuhan penduduknya. Dari Tabel 5.1, kita dapat melihat PDRB Jawa Timur berdasar pada harga konstan tahun 1983. Ditampilkan PDRB atas harga konstan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Jawa Timur.

**TABEL 5.1.**  
**PERTUMBUHAN PDRB**  
**BERDASAR ATAS HARGA KONSTAN TAHUN 1983**

TAHUN	PDRB (Juta Rp.)	Pertumbuhan
1980	7991793	-
1981	9008078	0.1272
1982	9995541	0.1096
1983	10184155	0.0189
1984	10848294	0.0652
1985	11513186	0.0613
1986	12147393	0.0551
1987	12895552	0.0616
1988	13523845	0.0487
1989	14420047	0.0663
1990	15495181	0.0746
1991	16736981	0.0801
1992	17924004	0.0709
1993	19186564	0.0704
1994	20511498	0.0691
1995	21994513	0.0723
1996	23796677	0.0819
1997	25776589	0.0832

Sumber : Kantor Statistik Jawa Timur, Jawa Timur Dalam Angka, Berbagai Tahun Penerbitan.

Berdasar pada Tabel diatas nampak bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu menunjukka angka positif, bahkan jika dirata-rata maka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 7,16 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1981 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 12,72 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1983 dengan tingkat pertumbuhan hanya mencapai 1,89 persen.

Pertumbuhan penerimaan pajak negara di Jawa Timur dapat disimak pada Tabel 5.2. Pada Tabel tersebut dijelaskan besarnya penerimaan pajak pusat di Jawa Timur dan besar pertumbuhan pada tahun yang bersangkutan.

TABEL 5.2.  
PENERIMAAN PAJAK PUSAT DI JAWA TIMUR

TAHUN	Penerimaan Pajak Pusat (000 Rp.)	Pertumbuhan
1980	39436514	-
1981	54748700	0.2796
1982	62200168	0.1197
1983	80900178	0.2311
1984	94179624	0.1410
1985	102866478	0.0844
1986	133770949	0.2310
1987	175607801	0.2380
1988	233726801	0.2486
1989	277421322	0.1575
1990	240626135	-0.1520
1991	431966992	0.4429
1992	557865000	0.2256
1993	661553000	0.1567
1994	791015776	0.1636
1995	1133901301	0.3023
1996	1349342548	0.1596
1997	1646197909	0.1803

Sumber : Kantor Statistik Jawa Timur, Jawa Timur Dalam Angka, berbagai edisi.  
Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur

Berdasar pada data diatas nampak bahwa pertumbuhan penerimaan pajak pusat di Jawa Timur periode 1980-1997 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan penerimaan pajak negara paling tinggi terjadi pada tahun 1991 yang mencapai 44,29 persen. Pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 1990 yang merupakan pertumbuhan negatif mencapai 15,20 persen. Namun demikian jika dirata-rata pertumbuhan penerimaan pajak negara mengalami pertumbuhan cukup besar, yaitu sebesar 25,28 persen pertahun.

## 5.2. Hasil Regresi

Setelah data yang diperlukan sesuai dengan variabel yang digunakan dalam model terkumpul, maka data yang berupa data *time series* tersebut diolah dengan komputer melalui program SPSS. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka persamaan regresi estimasi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = -3,967 + 1,249X_1 + 0,367 X_2$$



t Hitung	(27,243)	(6,760)
Prob.	(0,000)	(0,000)

Hasil regresi lainnya sebagai berikut :

ADJ. $R^2$	= 0,984
$R^2$	= 0,986
Multiple $R^2$	= 0,993
F-Ratio	= 682,013
Prob.	= 0,00
D-W Test	= 1,559

Keterangan atau penjelasan masing-masing item hasil regresi diatas akan dibahas dengan menggunakan alat bantu ekonometrika.

#### a. Koefisien regresi

Koefisien regresi dalam suatu persamaan menunjukkan arah perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah antara variabel terikat dengan variabel bebas. Tanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Semua variabel yang dimasukkan dalam model koefisiennya bertanda positif, yaitu : variabel  $X_1$  atau PDRB Jawa Timur dan variabel dummy atau reformasi perpajakan tahun 1994. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan variabel-variabel bebas tersebut searah dengan perubahan variabel terikat.

#### b. Koefisien Determinasi Majemuk ( $R^2$ )

Koefisien determinasi majemuk ( $R$  Squared) menunjukkan variasi perubahan dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebas secara bersama-sama. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin "baiklah" model tersebut (Aris Ananta, 1987 ; 40). Nilai dari  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam model tersebut. Nilai dari koefisien determinasi dari hasil perhitungan sebesar 0,986.

Hal ini berarti 98,6 % perubahan variabel terikat (penerimaan pajak negara di Jawa Timur) mampu dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam model, sisanya sebesar 1,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

### c. Koefisien Determinasi Majemuk yang Disesuaikan (Adjusted $R^2$ )

Dengan memperhitungkan derajat kebebasan yang digunakan maka koefisien determinasi majemuk yang disesuaikan dapat digunakan untuk melihat kemampuan model dengan adanya penambahan variabel bebas. Hal ini mengingat bahwa nilai-nilai  $R^2$  cenderung meningkat dengan naiknya jumlah variabel bebas dalam persamaan. Padahal penambahan variabel bebas akan memperkecil derajat kebebasan sehingga terdapat kemungkinan naiknya  $R^2$  tidak membuktikan bahwa model makin mampu menjelaskan variasi variabel tergantung (Aris Ananta, 1987 ; 41).

Hasil estimasi diatas menunjukkan adjusted  $R^2$  sebesar 0,984. Hal ini berarti dengan memperhitungkan derajat kebebasan, keseluruhan variabel bebas yang tercakup dalam model mampu menjelaskan variabel tergantung sebesar 98,4%, sedangkan sisanya sebesar 1,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

## 5.2.1. Uji Hipotesis

### 5.2.1.1. Uji Statistik t

Seperti telah dijelaskan pada teknik analisis, uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dimasukan dalam model secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Metode yang digunakan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. t hitung didapat dari *print out* komputer program SPSS, sedangkan nilai t tabel didapat dengan memperhatikan jumlah observasi atau pengamatan ( $n = 23$ ) dan derajat kebebasan ( $n-k-1$ ), sehingga derajat kebebasan didapat  $(23-2-1) = (DF = 20)$  dan menggunakan tingkat kesalahan ( $\alpha = 5\%$ ) serta dengan uji dua arah atau dua ekor. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel bebas yang bersangkutan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel

terikat. Sebaliknya, jika  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel maka variabel bebas yang bersangkutan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasar pada metode uji statistik  $t$  diatas, maka uji selengkapnya seperti tercantum pada Tabel 4.1. berikut. Pada tabel tersebut dicantumkan uji  $t$  dengan membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel dan uji  $t$  dengan membandingkan nilai probabilitas kesalahan parsial dengan tingkat kesalahan atau *level of significant* yang digunakan.

TABEL 5.3.  
UJI STATISTIK  $t$   
(DF = 14,  $\alpha = 5\%$ )

Variabel Bebas	T hitung	> / <	t tabel	Probabilitas	Kesimpulan
PDRB( $X_1$ )	27,243	>	2,069	0,00	Signifikan
DUMMY( $X_2$ )	6,760	>	2,069	0,00	Signifikan

Sumber : Print Out Komputer, Data Diolah

Untuk variabel PDRB Jawa Timur ( $X_1$ ), dengan nilai  $t$  hitung sebesar 27,243 >  $t$  tabel sebesar 2,069 dan probabilitas sebesar 0,00 < 0,05. Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB Jawa Timur atau variabel  $X_1$  memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur.

Untuk variabel dummy atau reformasi perpajakan 1994 ( $X_2$ ), dengan nilai  $t$  hitung sebesar 6,76 >  $t$  tabel sebesar 2,069 dan probabilitas sebesar 0,00 < 0,005. Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dummy reformasi perpajakan tahun 1994 atau variabel  $X_2$  memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur.

Berdasar pada hasil pembuktian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang dimasukan dalam model secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur selama periode penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama terbukti kebenarannya.

### 5.2.1.2. Uji Statistik F

Uji statistik F atau uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Metode yang dipakai dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. F hitung diperoleh dari hasil perhitungan SPSS, sedangkan F tabel didapat dengan memperhatikan tingkat kesalahan dan derajat kebebasan ( $\alpha = 5\%$  dan  $DF = 2,20$ ). Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel, variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasar pada ketentuan diatas maka uji statistik F pada penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar  $682,013 > F$  tabel sebesar  $3,49$  dan probabilitas kesalahan  $0,00 < 0,05$ , berdasar perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang dimasukkan dalam model, yaitu PDRB Jawa Timur dan variabel dummy atau reformasi perpajakan tahun 1994 secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Hal tersebut ditunjang dengan nilai  $R^2$  sebesar  $0,986$  artinya kemampuan variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama dalam mempengaruhi variasi perubahan variabel terikat sebesar  $98,6\%$  sisanya  $1,4\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Berdasar pada hasil pembuktian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama mampu mempengaruhi variasi perubahan penerimaan pajak negara di Jawa Timur, dengan demikian hipotesis terbukti kebenarannya.

### 5.3. Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinieritas, Uji Auto Korelasi Dan Uji Heteroskedastisitas).

Adanya multikolinearitas merupakan pelanggaran dari asumsi klasik, karena

akan menyebabkan pemerkiraan OLS tidak dapat ditentukan (*indeterminate*) serta varian dan standard errornya tak terhingga. Untuk mendeteksi gejala multikolinearitas dapat dilakukan melalui nilai  $R^2$ , nilai uji F dan  $r^2$ . (J. Supranto 1983 : 20 ). Multikolinearitas terjadi apabila nilai  $R^2$  tinggi antara 0,7 - 1, tetapi tidak satupun atau sangat sedikit koefisien regresi parsial yang secara individual penting secara statisitik atas dasar pengujian t yang konvensional (Damodar Gujarati 1991 : 166).

Hasil perhitungan menunjukkan F hitung (observasi) yang tinggi (F hitung = 682,013 > F tabel = 3,49), nilai  $R^2$  tinggi = 0,986 dan uji statistik t menunjukkan bahwa dua dari tiga variabel bebas signifikan, sehingga dapat membuktikan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

Istilah auto korelasi (*autocorelation*) dapat didefinisikan sebagai korelasi/keterkaitan antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. (Damodar Gujarati 1991 : 201). salah satu asumsi penting dari perhitungan asumsi klasik adalah tidak terdapatnya auto korelasi atau kondisi yang berurutan diantara pengganggu\* (*disturbance*) yang digunakan dalam fungsi regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam perhitungan regresi atas penelitian ini, maka akan digunakan tes Durbin-Watson (*DW-test*). Secara spesifik, uji D-W dua sisi memiliki 5 kelompok atau 5 bagian daerah sebagaimana terlihat pada gambar 4.1. Dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  = tidak auto korelasi baik positif maupun negatif

$H_A$  = ada auto korelasi

Maka statistik uji D-W adalah sebagai berikut :

1. Nilai d terbentang dari 0 sampai 4
2. Bila  $d < d_L$  atau  $d > 4-d_L$ , maka  $H_0$  ditolak
3. Bila  $d_U < d < 4-d_U$ , maka  $H_0$  diterima
4. Bila  $d_L \leq d \leq d_U$  atau  $4-d_U \leq d \leq 4-d_L$ , maka pengujian tidak menghasilkan kesimpulan pasti (pengujian tidak meyakinkan).

Dari hasil perhitungan melalui program SPSS, seperti terlampir pada lampiran II, nilai Durbin - Watson test sebesar 1,559, sedangkan  $d_U$  tabel sebesar 1,54 dan  $4-d_U$

sebesar 2,46, sehingga terlihat bahwa hasil perhitungan D-W termasuk dalam daerah penerimaan  $H_0$ , dengan demikian berarti dalam model ini tidak terdapat auto korelasi positif maupun negatif (Algifari 1990 ; 54).

Uji heteroskedastisitas, untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas ada beberapa metode yang dapat digunakan salah satunya adalah metode *Rank Spearman correlation*. Pembuktian ada tidaknya *heteroskedastisitas* adalah sebagai berikut : Setelah data disusun berdasarkan urutan tahun, kemudian data yang ada diranking sehingga menghasilkan urutan sebagai berikut :

TABEL 5.4.  
ANALISA RANK SPEARMAN

Tahun	Rank $X_1$	Rank $X_2$	Rank e	$d_1^2$	$d_2^2$
1975	1	1	4	9	9
1976	2	1	16	196	225
1977	3	1	8	25	49
1978	4	1	15	121	196
1979	5	1	6	1	25
1980	6	1	19	169	324
1981	7	1	2	25	1
1982	8	1	13	25	144
1983	9	1	18	81	289
1984	10	1	12	4	121
1985	11	1	5	36	16
1986	12	1	17	25	256
1987	13	1	10	9	81
1988	14	1	9	25	64
1989	15	1	11	16	100
1990	16	1	1	225	0
1991	17	1	14	9	169
1992	18	1	20	4	361
1993	19	1	22	9	441
1994	20	20	21	1	1
1995	21	20	7	196	169
1996	22	20	23	1	9
1997	23	20	3	400	289
Jumlah				1612	3339

Sumber : List Data Dan Residual Program SPSS, Data Diolah.

Koefisien korelasi Ranking Spearman didapat dengan rumus :

$$r_s = 1 - 6 \left[ \frac{\sum d^2}{N^3 - N} \right]$$

Untuk memperoleh nilai t observasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r_i \sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r_i^2}}$$

Dengan derajat kebebasan N-2, didapat nilai t tabel sebesar 0,425. Hasil selangkapnya uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

TABEL 5.5.

TABEL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variabel	Rank Spearman	t - hitung	>/<	t - tabel	Kesimpulan
X1	-0.20356	1,0029	<	2,080	Homoskedastis
X2	-0.6497	-0,2440	<	2,080	Homoskedastis

Sumber : Print Out SPSS, Data Diolah

Untuk menguji gejala heteroskedastisitas, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t observasi, apabila :

$t_o < t_t$  = tidak terjadi heteroskedastisitas

$t_o > t_t$  = terjadi heteroskedastisitas

Dari hasil perhitungan menunjukkan t observasi semua variabel bebas lebih kecil dibandingkan dengan t tabel, sehingga dapat disimpulkan dalam model diatas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Berdasar pada pengujian tersebut maka pada model yang dipakai tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik yaitu : Non Heteroskedastisitas, Non Multikolinearitas dan Auto Korelasi, sehingga model tersebut valid sebagai estimator.

#### 5.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Selain itu perlu dicermati besarnya koefisien regresi dan koefisien korelasi parsial ( $r^2$ ) yang mencerminkan peranan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat jika diasumsikan variabel bebas lain dianggap konstan. Koefisien regresi menunjukkan besarnya perubahan variabel terikat yang diakibatkan oleh kenaikan atau penurunan variabel bebasnya.

Koefisien regresi untuk variabel PDRB ( $X_1$ ) sebesar 1,249 ini berarti jika variabel PDRB Jawa Timur bertambah atau naik sebesar 100 satuan maka akan berakibat pada penambahan 124 satuan penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Sebaliknya 1,249 ini berarti jika variabel PDRB Jawa Timur berkurang atau turun sebesar 100 satuan maka akan berakibat pada pengurangan 124 satuan penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Hal tersebut ditunjang oleh besarnya koefisien korelasi parsial ( $r^2$ ) sebesar 0,987 artinya 98,7 % perubahan variabel PDRB Jawa Timur mampu mempengaruhi perubahan penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Asumsi yang dipakai adalah variabel bebas lain dianggap konstan atau nol.

Koefisien regresi untuk variabel dummy atau reformasi perpajakan tahun 1994 ( $X_2$ ) sebesar 0,367 ini berarti jika variabel dummy atau reformasi perpajakan tahun 1994 dilaksanakan maka akan berakibat pada penambahan 0,367 satuan penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Sebaliknya jika variabel dummy atau reformasi perpajakan tahun 1994 tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada pengurangan 0,367 satuan penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Hal tersebut ditunjang oleh besarnya koefisien korelasi parsial ( $r^2$ ) sebesar 0,834 artinya 83,4 % perubahan variabel dummy atau reformasi perpajakan tahun 1994 mampu mempengaruhi perubahan penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Asumsi yang dipakai adalah variabel bebas lain dianggap konstan atau nol.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan perhitungan dan pembuktian hipotesis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Secara parsial variabel bebas yang dimasukkan dalam model (PDRB Jawa Timur dan Variabel dummy atau reformasi perpajakan tahun 1994) mampu mempengaruhi penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Hal ini didukung oleh nilai  $t$  hitung variabel PDRB Jawa Timur = 27,243 > nilai  $t$  tabel = 2,069 dan  $t$  hitung variabel dummy = 6,76 >  $t$  tabel = 2,069. Dari kedua pembuktian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama terbukti kebenarannya.
2. Secara simultan, variabel bebas yang dimasukkan dalam model (PDRB Jawa Timur dan Variabel dummy atau reformasi perpajakan tahun 1994) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau penerimaan pajak negara di Jawa Timur. Hal ini didukung oleh nilai  $F$  hitung = 682,013 > nilai  $F$  tabel = 3,49 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur yang juga berarti hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini terbukti kebenarannya.
3. Dari kedua variabel bebas yang dimasukkan dalam model ternyata variabel PDRB Jawa Timur memiliki pengaruh dominan terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur dibandingkan dengan pengaruh reformasi perpajakan tahun 1994 atau variabel dummy. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung, probabilitas parsial dan koefisien korelasi parsial PDRB Jawa Timur yang lebih besar dari nilai  $t$  hitung, probabilitas parsial dan koefisien korelasi parsial PDRB Jawa Timur reformasi perpajakan tahun 1994 atau variabel dummy.

4. Hasil penelitian ini hanya berlaku pada periode penelitian dan kondisi ekonomi dalam keadaan normal.

## 6.2. Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Guna meningkatkan penerimaan pajak negara di Jawa Timur, maka pertumbuhan PDRB Jawa Timur harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, hal tersebut terlihat dari peranan PDRB Jawa Timur memiliki arah perubahan yang searah terhadap penerimaan pajak negara di Jawa Timur, jadi semakin tinggi PDRB akan semakin tinggi penerimaan pajak negara di Jawa Timur.
2. Reformasi perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak negara di Jawa Timur, untuk itu perlu terus digali sumber-sumber penerimaan negara dari sektor pajak melalui reformasi perpajakan yang diperbaharui sesuai dengan tuntutan jaman.

## Regression Reformasi Perpajakan

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Y	8.6663	.6643	23
X1	10.0621	.4588	23
X2	1739	.3878	23

**Correlations**

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.978	.870
	X1	.978	1.000	.529
	X2	.870	.529	1.000
Sig. (1-tailed)	Y		.000	.000
	X1	.000		.005
	X2	.000	.005	
N	Y	23	23	23
	X1	23	23	23
	X2	23	23	23

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.588	2	4.785	682.013	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.140	20	7.015E-03		
	Total	9.710	22			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.993 <sup>a</sup>	.986	.984	.376E-02	.986	682.013	2	20	.000	1.559

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial
1	(Constant)	-3.967	.457	-8.683	.000	-4.920	-3.014		
	X1	1.249	.046	27.243	.000	1.154	1.345	.976	.987
	X2	.367	.054	6.760	.000	.254	.480	.670	.834

a. Dependent Variable: Y

## DARFTAR PUSTAKA

- Atep, Adya Barata dan Ardian, Zul Afidi, *Perpajakan*, CV. Armico, Bandung, 1989.
- Ananta, Aris, *Landasan Ekonometrika*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Nasution, Anwar, *Resesi Dan Kebijaksanaan Ekonomi*, Prima No. 3, Maret, 1983.
- Pasaribu, Amudi, *Ekonometrika*, Penerbit Borta Gorat, Jakarta, 1976.
- P. Soria Atmaja, Arifin, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Aronson, J. Richard, *Public Finance*, Mc. Graw Hill co., Singapore, 1985.
- B. Usman dan K. Subroto, *Pajak-Pajak di Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1980.
- Boediono, *Ekonomi Makro*, BPFE UGM., Yogyakarta, 1985.
- Gujarati, Damodar, *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan, Penerbit Airlangga, Jakarta, 1987.
- Zain, H. Moh., dan Arinta, Kustandi, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.
- Kartasasmita, Hussein, *Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan Tahun 1984*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1985.
- Higgins, Benjamin, *Economic Development*, W. W. Norton & Co. Inc., New York, 1980.
- Insukindro, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Cadangan Devisa dan Angka Pengganda Uang Beredar Di Indonesia*, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Desember 1984.
- Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur, *Statistik Penerimaan Kanwil IX Jawa Timur Pelita I-V*, Surabaya.
- Kantor Statistik Jawa Timur, *Jawa Timur Dalam Angka*, Pemerintah daerah I Jawa Timur, Surabaya, Berbagai Edisi.

